

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## BAB I PENDAHULUAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.1. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2024 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasioanl).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

## 1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD TA. 2021;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD TA. 2021;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/16598-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Awal Tahun Anggaran 2024 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

#### **Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD**

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan akuntansi**

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

#### **Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Pendapatan LO
  - 5.1.4. Beban LO
  - 5.1.5. Aset
  - 5.1.6. Kewajiban
  - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

#### **Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD**

#### **Bab VII Penutup**

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 tren perbaikan ekonomi meningkat dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar 5,29 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,72 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-Pemerintah) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 34,10 persen.

Ekonomi makro yang menguntungkan ini berkorelasi positif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Pulau Kalimantan, yaitu mencapai 45,90 persen.

#### 2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset nontunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp. 1.141.423.600,00 nilai ini sudah melampaui dari targetnya sebesar Rp.891.400.000,00 atau sebesar 128,05%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp.13.156.200 atau sebesar 1,17% dari realisasi pendapatan tahun lalu

sebesar Rp. 1.128.267.400. Anggaran belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp. 152.666.467.816,00, dengan realisasi sebesar Rp. 135.771.098.140,70 atau sebesar 88,93%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp. 44.384.018.291,70 atau sebesar 48,57% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp. 91.387.079.849. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd		
				(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	RP	
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					138.958.771.425
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					123.956.005.431,70
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	positif	87	%	94.748.246.935,70
2.17.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	positif	29	nilai	1.267.733.726
2.17.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	positif	6	Dokumen	631.221.327
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	positif	5	Dokumen	43.444.500

2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	positif	4	Dokumen	27.630.000
2.17.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	positif	11	Laporan	398.024.730
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	3	Laporan	167.413.169
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	positif	100	%	21.308.100.322
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Positif	75	Orang/Bulan	20.339.761.539
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Positif	12	Dokumen	588.840.000
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Positif	4	Dokumen	13.303.000
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Positif	2	Laporan	123.945.076

2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Positif	3	Dokumen	171.615.660
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Positif	14	Laporan	40.189.320
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	positif	2	Dokumen	30.445.727
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	positif	18	Dokumen	157.898.600
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	positif	1	Dokumen	30.000.000
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	positif	1	Dokumen	46.400.000
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	4	Laporan	12.598.600
2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	positif	2	Dokumen	54.400.000
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Positif	189	orang	1.405.314.787
2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	positif	1	Unit	44.940.000,00

2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	positif	1	Paket	145.200.000,00
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	positif	3	Dokumen	544.303.861,00
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	positif	1	Dokumen	25.029.922,00
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	positif	2	Dokumen	75.445.370,00
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	30	Orang	570.395.634,00
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	Dokumen	4.043.211.449,70
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	5	Paket	102.572.466,00
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	1	Paket	563.720.000,00
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	1	Paket	102.599.733,00
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	5	Paket	1.544.268.814,00
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	12	Paket	313.374.200,00

2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	4	Dokumen	22.800.000,00
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	positif	5	Laporan	306.248.906,00
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	12	Laporan	891.665.463,00
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	positif	1	Dokumen	91.093.466,00
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	positif	1	Dokumen	104.868.401,70
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	positif	100	paket	56.704.108.740
2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	positif	1,00	Unit	1.459.300.000,00
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	3,00	Paket	15.000.000,00
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	150,00	Unit	545.624.500,00
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	positif	5,00	Unit	199.000.000,00
2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	1,00	Unit	54.086.197.990,00

2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	1,00	Unit	199.103.000,00
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	1,00	Unit	199.883.250,00
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	positif	60	kegiatan	7.377.037.729
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	27.582.000,00
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	36	Laporan	738.111.249,00
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	6.611.344.480,00
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	positif	200	unit	2.507.700.379
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	positif	8	Unit	35.983.500,00
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	positif	16	Unit	327.704.670,00

2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	105	Unit	254.976.408,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	10	Unit	1.568.390.444,00
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	3	Unit	320.645.357,00
<b>2.17.003</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase tercapainya target Koperasi sehat</b>	<b>positif</b>	<b>47</b>	<b>%</b>	<b>712.891.341</b>
2.17.003.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	positif	44	Koperasi	482.654.799
2.17.003.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	positif	25	unit usaha	482.654.799,00
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	positif	23,64	%	230.236.542,00
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	positif	55	Unit Usaha	230.236.542,00

	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Modern binaan provinsi</b>	positif	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>969.886.276,00</b>
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	positif	44,35	%	969.886.276,00
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	positif	30	UnitUsaha	309.988.260,00
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	positif	36	UnitUsaha	659.898.016,00
<b>2.17.007</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital</b>	positif	<b>5,02</b>	<b>%</b>	<b>6.443.501.476,00</b>
2.17.007.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	positif	7,52	%	6.443.501.476,00

	Kepentingan					
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		115	Unit Usaha	5.155.700.645,00
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		150	Orang	340.583.000,00
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata		3.466	Unit Usaha	405.349.831,00
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		157	Unit Usaha	541.868.000,00
<b>2.17.008</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Jumlah UKM Potensial Ekspor</b>	<b>positif</b>	<b>20</b>	<b>UKM</b>	<b>858.823.378,00</b>
2.17.008.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	positif	460	UKM	858.823.378,00
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan		40	Unit Usaha	632.701.378,00

		Teknologi				
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		247	Orang	632.701.378,00
3.30.002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	positif	100	%	270.637.510,00
		persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	positif	86,57	%	
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan	positif	18	Pelaku usaha	202.398.600
		jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	positif	100	%	
3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	positif	3	Dokumen	40.477.980,00
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	positif	3	Laporan	79.912.626,00
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	positif	265	Eksportir	150.246.904,00
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	positif	3033	Dokumen	150.246.904,00

3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan</b>	positif	10	%	441.045.000,00
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	Positif	6	kegiatan	441.045.000,00
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Positif	5	unit	441.045.000,00
3.30.004	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting</b>	positif	12,8 7	%	976.213.698,00
		<b>Persentase kinerja realisasi pupuk</b>	positif	69	%	
3.30.004.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	positif	100	%	305.518.494,00
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	positif	223	Laporan	214.335.854,00
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	positif	50	laporan	91.182.640,00

3.30.004.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase komoditi bapokting yang di pantau	positif	80	%	531.979.204,00
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	positif	12	Laporan	351.131.505,00
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	positif	14	Laporan	180.847.699,00
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Positif	10	laporan	138.716.000,00
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Positif	5	laporan	107.311.500,00

3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Positif	5	laporan	31.404.500,00
<b>3.30.005</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru</b>	<b>positif</b>	<b>28</b>	<b>jenis</b>	<b>1.183.406.551,00</b>
3.30.005.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	positif	10	Pelaku usaha	1.183.406.551,00
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	positif	5	PelakuUsaha	349.445.689,00
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	positif	5	PelakuUsaha	198.369.106,00
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	positif	6	PelakuUsaha	99.729.747,00
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	positif	20	Produk	535.862.009,00
<b>3.30.006</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan</b>	<b>positif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4.115.886.987,00</b>

3.30.006.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	positif	1274	orang	3.431.689.737,00
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		13	BPSK	2.549.805.675,00
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		1	LPKSM	216.000.000,00
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani		14	Pengaduan	665.884.062,00
3.30.006.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	positif	5	%	684.197.250,00
3.30.006.1.03.001	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	positif	3	laporan	684.197.250,00
3.30.007	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri</b>	positif	75	%	<b>1.034.393.090,00</b>
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	positif	25	%	268.694.215,00
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui	positif	9	UMKM	268.694.215,00

		kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	positif	14,20	%	314.207.827,00
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	positif	10	ukm	314.207.827,00
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi	positif	800	orang	451.491.048,00
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	positif	7	laporan	451.491.048,00
3.31.002	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara</b>	positif	0	%	<b>11.241.779.929,00</b>

3.31.002.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	positif	9	Dokumen	11.241.779.929,00
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	positif	10,00	Dokumen	2.599.381.965,00
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	positif	3,00	Dokumen	75.840.000,00
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	positif	1,00	Dokumen	333.054.240,00
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	positif	1,00	Dokumen	46.112.200,00
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	positif	7,00	Dokumen	7.775.870.962,00
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	positif	1,00	Dokumen	112.414.962,00
3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan	positif	1,00	Laporan	99.543.200,00

	Penyebaran dan Perwilayahan Industri	penyabaran dan perwilayahan industri				
3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	positif	1,00	Rekomen dasi	100.000.000,00
3.31.02.1.01.0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	positif	1,00	Rekomen dasi	99.562.400,00
<b>3.31.003</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri</b>	positif	<b>10,9 5</b>	<b>%</b>	<b>535.094.582,00</b>
3.31.003.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	positif	53,5 7	%	535.094.582,00
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	positif	1,00	Dokumen	362.562.359,00
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui		positif	3,00		172.532.223,00

	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					
3.31.004	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas</b>	positif	59,24	%	424.198.678,00
3.31.004.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	positif	174	industri	424.198.678,00
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	positif	1,00	Dokumen	110.103.742,00
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	positif	1,00	Dokumen	81.711.474,00
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	positif	2,00	Dokumen	232.383.462,00

3.31.3.30.2.17.01.00 02	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang					4.714.806.017
3.30.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	positif	100,00	%	3.086.122.593,00
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	positif	95,43	%	
3.30.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	positif	13	dokumen	79.320.000,00
3.30.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	13	Dokumen	79.320.000,00
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	positif	5	dokumen	57.196.206,00
3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	positif	12	Dokumen	9.967.036,00
3.30.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	positif	12	Dokumen	8.780.000,00
3.30.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	positif	12	Laporan	8.700.000,00
3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	positif	12	Dokumen	12.580.000,00
3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	positif	12	Laporan	17.169.170,00
3.30.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	positif	20	Orang	154.311.120,00

3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	20	Orang	154.311.120,00
3.30.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	6	dokumen	656.344.741,00
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	10	Paket	11.986.507,00
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	4	Paket	145.217.580,00
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	positif	11	Paket	42.871.100,00
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	1.920.000,00
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	positif	2	Laporan	7.660.000,00
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	14	Laporan	446.689.554,00
3.30.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	10	paket	1.275.000,00
3.30.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	1	unit	1.275.000,00

3.30.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	38	kegiatan	2.015.046.029
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	12	Laporan	9.039.000
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	11	Laporan	156.341.909
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	1.849.665.120
3.30.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	positif	48	unit	122.629.497,00
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	positif	4	Unit	27.099.272,00
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	40	Unit	43.870.225,00
3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	4	Unit	51.660.000,00
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Mutu layanan UPTD BPSMB	positif	95,43	%	1.628.683.424,00
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	positif	75,00	%	
3.30.006.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh	jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP	positif	10	IKM	1.628.683.424

	Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluhan pelanggan	positif	0	%	
		jumlah laporan mutu akreditas	positif	11	laporan	
		persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	positif	124	%	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	positif	2.976	Sertifikat	663.556.354,00
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	positif	147	laporan	557.505.809,00
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	positif	5	Produk	72.602.050,00
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	positif	1	Sertifikat	335.019.211,00
<b>3.31.3.30.2.17.01.0003</b>	<b>UPTD Pelatihan Koperasi</b>					<b>8.292.296.701,00</b>
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	positif	80	indeks	3.583.090.110,00
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	positif	80	%	
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	positif	12	Dokumen	87.960.000,00
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	87.960.000,00
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	positif	4	Dokumen	44.816.900,00

2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	positif	12	Dokumen	9.450.000,00
2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	positif	12	Dokumen	8.336.000,00
2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	positif	0	Laporan	2.200.000,00
2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	positif	12	Dokumen	7.580.000,00
2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	positif	12	Laporan	17.250.900,00
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi k	positif	12	orang	117.403.000,00
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	12	Orang	117.403.000,00
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	12	dokumen	409.589.864,00
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	12	Paket	24.489.500,00
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	70	Paket	75.114.000,00
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	12	Paket	28.950.000,00
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	positif	1	Paket	14.178.500,00

		Disediakan				
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	12	Paket	39.724.746,00
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	positif	12	Dokumen	1.395.000,00
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	positif	24	Paket	85.460.000,00
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	20	Laporan	140.278.118,00
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	12	unit	389.450.000,00
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	positif	4	Paket	146.700.000,00
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	14	Unit	242.750.000,00
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	12	dokumen	2.215.870.674,00
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	positif	50	Laporan	5.052.000,00
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	12	Laporan	154.662.869,00
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	positif	3	Laporan	43.521.000,00

		Disediakan				
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	12	Laporan	2.012.634.805,0 0
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	positif	12	bulan	317.999.672,00
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	positif	100	Unit	32.722.372,00
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	45	Unit	57.678.300,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	100	Unit	227.599.000,00
2.17.005	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan</b>	<b>positif</b>	<b>1,40</b>	<b>%</b>	<b>4.709.206.591,0 0</b>
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	positif	150	Orang	4.709.206.591,0 0
		Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	positif	520	orang	
2.17.005.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	positif	670	orang	4.709.206.591,0 0

Tabel 1. Target Kinerja Dalam Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2024 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.306.545.160,00 pada Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.267.733.726,00 atau 97,03%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.187.502.052,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 80.231.674 atau 0,07%. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan pagu anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 654.915.710,00 dan terealisasi sebesar Rp. 631.221.327,00 atau 96,38%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 785.248.510,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 154.027.183,00 atau 0,20% dari tahun lalu. hal ini disebabkan adanya penurunan kegiatan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.630.000,00 atau 99,93%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.444.500,00 atau 91,08%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 401.379.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 398.024.730,00 atau 99,16%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 402.253.542,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp.4.228.812,00 atau 0,11% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggaran di TA 2024.

- ***Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 174.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 167.413.169,00 atau 95,72%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 23.912.253.010,00 pada Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 21.308.100.322,00 atau 89,11%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 14.916.432.275,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.391.668.047,00 atau 0,43%. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan pagu anggaran di TA 2024 dan penambahan beberapa subkegiatan pada TA 2024.

- ***Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.863.813.010,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.339.761.539,00 atau 88,96%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 13.857.380.275,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.482.381.264,00 atau 0,47% dari tahun lalu. hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan pegawai di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 610.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 588.840.000,00 atau 96,39%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 530.060.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 58.780.000,00 atau 0,11% dari tahun lalu. hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran dan subkegiatan di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 173.520.000,00 dan realisasi di tahun ini sebesar Rp. 171.615.660,00 atau 98,90% Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 203.120.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 31.504.340,00 atau 0,16% dari tahun lalu. hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.303.000,00 atau 88,96%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 123.945.076,00 atau 96,39%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.189.320,00 atau 78,40%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 70.680.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 30.490.680,00 atau 0,43% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan dan sebesar Rp. 48.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.445.727,00 atau 62,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 63.876.200,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 33.430.473,00 atau 0,52% dari tahun lalu. hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

• **Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.566.354.100,00 pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di TA 2024. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.405.314.787,00 atau 89,72%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.943.546.598,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 538.231.811,00 atau 0,28% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai***

Pada tahun 2024 kegiatan ini tidak dianggarkan dan pada tahun 2023 di anggarkan sebesar Rp.439.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp358.681.510,00 atau 81,86%.

- ***Kegiatan Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 146.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 145.200.000,00 atau 99,10%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 649.405.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 544.303.861,00 atau 83,82%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

**- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 25.029.922,00 atau 99,33%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

**- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 82.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 75.445.370,00 atau 92,01%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

**- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 618.224.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 570.395.634,00 atau 92,26%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 4.101.510.523,00 pada Program Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 4.043.211.449,70 atau 98,58%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.319.405.900,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 2723805549,70 atau 2,06% dari tahun lalu.hal ini adanya kenaikan anggaran di TA 2024.

**- Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.768.525.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.732.380.000,00 atau 95,30%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp.516.821.137,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.215.558.863,00 atau 29,4% dari tahun lalu.hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran di TA 2024.

**- Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.152.627.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.152.554.400,00 atau 99,95%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp.310.618.800,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp.158.064.400,00 atau 104% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

**- Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.411.753.790,00 dan terealisasi sebesar Rp.411.391.500,00 atau 99,91%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp.149.534.500,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp.261.857.000,00 atau 63,7% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.23.270.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.080.000,00 atau 99,18%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp.20.220.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp.2.860.000,00 atau 12,39% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 102.686.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 102.572.466,00 atau 99,89%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 103.048.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 102.599.733,00 atau 99,56%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 310.750.085,00 dan terealisasi sebesar Rp 306.248.906,00 atau 98,55%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 895.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 891.665.463,00 atau 99,61%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 97.037.946,00 dan terealisasi sebesar Rp 91.093.466,00 atau 93,87%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 107.637.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 104.868.401,70,00 atau 97,43%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 66.628.313.195,00 pada Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 56.704.108.740,00 atau 85,11%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 31.183.759.528,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp. 25.520.349.212,00 atau 0,82% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.475.548.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.459.300.000,00 atau 98,90%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 472.300.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp. 987.000.000,00 atau 2,09% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengadaan mebel***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.036.685,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 99,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 2.217.638.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 2.202.638,000,00 atau 99,3% dari tahun lalu.hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.967.377.331,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.086.197.990,00 atau 84,04%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 27.652.627.128,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp. 26.433.570.862,00 atau 95,6% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 567.031.829,00 dan terealisasi sebesar Rp. 545.624.500,00 atau 96,22%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 841.194.400,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 295.569.900,00 atau 35,1% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.873.666.230,00 dan terealisasi sebesar Rp.841.194.400,00 atau 96,28%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.873.666.230,00 dan terealisasi sebesar Rp.841.194.400,00 atau 96,28%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.873.666.230,00 dan terealisasi sebesar Rp.841.194.400,00 atau 96,28%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- **Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 8.352.675.340,00 pada Program Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 7.377.037.729,00 atau 88,32%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 9.021.260.106,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.644.222.377,00 atau 18,02% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

  - ***Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 32.222.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.582.000,00 atau 85,60%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 4.718.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 22.863.500,00 atau 4,8% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 898.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 738.111.249,00 atau 82,16%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 656.354.746,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp. 81.756.503,00 atau 12,15% dari tahun lalu.hal ini disebabkan penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.422.073.040,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.611.344.480,00 atau 89,06%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 8.360.186.860,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.748.842.380,00 atau 20,9% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
- **Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.555.422.526,00 pada Program Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.507.700.379,00 atau 98,13%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.033.956.214,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.473.744.165,00 atau 142% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

  - ***Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.991.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.983.500,00 atau 89,98%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 447.066.099,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 411.082.599,00 atau 92% dari tahun lalu.hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegiatan Pemelihraan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 324.756.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 320.645.357,00 atau 98,73%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 586.890.115,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 266.244.758,00 atau 45,04% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 359.550.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 327.704.670,00 atau 91,14%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
  - ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 261.600.216,00 dan terealisasi sebesar Rp. 254.976.408,00 atau 97,47%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.569.525.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.568.390.444,00 atau 99,93%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 504.432.515,00 pada Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 482.654.799,00 atau 95,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 581.817.900,00 maka terjadi penurunan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 504.432.515,00 dan terealisasi sebesar Rp. 482.654.799,00 atau 95,68%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 230.300.000,00 pada Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 230.236.542,00 atau 99,57%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena program baru ada di TA 2024.

- **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 999.468.500,00 pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 969.886.276,00 atau 97,04%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.412.111.613,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 442.225.337,00 atau 31,3% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- *Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 339.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 309.988.260,00 atau 91,38%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.412.111.613,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.102.123.353,00 atau 78,00% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- *Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 660.248.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 659.898.016,00 atau 99,95%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- **Program Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 6.914.608.816,00 pada Program Pemberdayaan usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 6.443.501.476,00 atau 93,19%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 608.289.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 5.835.211.976,00 atau 9.06% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentas Kemiskinan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.605.347.831,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.155.700.645,00 atau 91,98%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. Rp. 608.289.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 4.547.411.145,00 atau 70.5% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 341.411.345,00 dan terealisasi sebesar Rp. 340.583.000,00 atau 99,76%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 423.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 405.349.831,00 atau 95,78%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 544.649.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 541.868.000,00 atau 99,49%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- **Program Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 916.990.000,00 pada Program Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 858.823.378,00 atau 99,10%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp.3.183.230.803,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 2.324.407.425,00 atau 73% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 682.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 632.701.378,00 atau 92,69%. Bila dibandingkan dengan

tahun lalu realisasi sebesar Rp. 3.183.230.803,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 2.550.529.425,00 atau 80,12% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 234.390.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 226.122.000,00 atau 96,47%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 121.683.000,00 pada Program Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 120.390.606,00 atau 98,94%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena program baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 407.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 404.779.800,00 atau 99,39%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.958.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.912.626,00 atau 98,71%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor (API)**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 156.798.600,00 pada Program Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor (API). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 150.246.904,00 atau 95,82%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 200.035.990,00 maka terjadi

- penurunan sebesar Rp. 49.789.086,00 atau 24,89% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
- ***Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Layanan Penerbitan SKA***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 156.798.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 150.246.904,00 atau 95,28%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 200.035.990,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 49.789.086,00 atau 24,89% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
  - **Program Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 457.400.000,00 pada Program Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 441.045.000,00 atau 96,42%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena program baru ada di TA 2024.

    - ***Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 457.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 441.045.000,00 atau 96,42%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
  - **Program Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 307.200.000,00 pada Program Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 305.518.494,00 atau 99,45%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 356.861.083,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 51.342.589,00 atau 14,39% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

    - ***Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Di Tingkat Distributor dan Sub Distributor***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 215.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 214.335.854,00 atau 99,41%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 356.861.083,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 142.525.229,00 atau 39,94% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 91.182.640,00 atau 99,54%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 519.433.078,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 428.250.438,00 atau 82,45% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

• **Program Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 147.890.400,00 pada Program Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 138.716.000,00 atau 93,80%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena program baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 115.800.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.311.500,00 atau 92,67%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 32.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.404.500,00 atau 97,86%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.220.347.800,00 pada Program Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Danag dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) daerah

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.183.406.551,00 atau 96,97%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.627.880.804,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 444.474.253,00 atau 27,30% dari tahun lalu. hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 114.152.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.729.747,00 atau 87,37%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.268.012.075,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.168.282.328,00 atau 92,13% dari tahun lalu. hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.347.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 349.445.689,00 atau 99,74%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pameran Dagang Lokal***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 198.369.106,00 atau 99,18%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 555.848.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 535.862.009,00 atau 96,40%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 269.984.300,00 pada Program Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 268.694.215,00 atau 99,52%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena program baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 269.984.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 268.694.215,00 atau 99,52%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- **Program Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 314.413.100,00 pada Program Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 314.207.827,00 atau 99,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 642.466.391,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 328.258.564,00 atau 51,09% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

  - ***Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Pengguna Produk Dalam Negeri Di Tingkat Provinsi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 314.413.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 314.207.827,00 atau 99,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 642.466.391,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 328.258.56466,00 atau 51,09% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
- **Program Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 458.780.000,00 pada Program Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 451.491.048,00 atau 98,41%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena program baru ada di TA 2024

  - ***Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 458.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 451.491.048,00 atau 98,41%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- **Program Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 3.643.526.440,00 pada Program Pelaksanaan Perkindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 3.431.689.737,00 atau 94,19%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 3.378.611.940,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp. 53.077.797,00 atau 1,57% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

  - ***Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan***

***Konsumen***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.709.894.440,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.549.805.675,00 atau 94,09%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.025.766.283,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.524.039.392,00 atau 148,58% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 216.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 216.000.000,00 atau 100%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 717.632.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 665.884.062,00 atau 92,79%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 2.352.845.657,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.686.961.595,00 atau 71,70% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

• **Program Pelaksanaan Pengawasan barang Beredar dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 695.811.800,00 pada Program Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 684.197.250,00 atau 98,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 522.395.701,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 161.801.549,00 atau 30,97% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 695.811.800,00 terealisasi sebesar Rp. 684.197.250,00 atau 98,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 522.395.701,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 161.801.549,00 atau 30,97% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- **Program Penyusunan, Penyerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 11.444.463.700,00 pada Program Penyusunan, Penyerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 11.241.779.929,00 atau 98,23%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.929.378.779,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 9.312.401.150,00 atau 482,66% dari tahun lalu. hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 81.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 75.840.000,00 atau 92,94%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 285.371.580,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 209.531.580,00 atau 73,42% dari tahun lalu. hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 337.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 333.054.240,00 atau 98,71%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 110.217.400,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 222.836.840,00 atau 202,18% dari tahun lalu. hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.833.063.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.775.870.962,00 atau 99,27%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.401.171.321,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.374.699.641,00 atau 454,96% dari tahun lalu. hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.414.962,00 atau 93,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 132.618.478,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 20.203.516,00 atau 15,23% dari tahun lalu. hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.725.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.599.381.965,00 atau 95,39%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.112.200,00 atau 97,28%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.543.200,00 atau 99,54%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 100%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.562.400,00 atau 99,56%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Kawasan Industri(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 586.000.000,00 pada Program Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 535.094.582,00 atau 91,31%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 654.027.742,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 118.933.160,00 atau 18,18% dari tahun lalu.hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan***

***IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 179.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 172.532.223,00 atau 96,39%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 195.525.267,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 22.993.044,00 atau 11,76% dari tahun lalu.hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 407.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 362.562.359,00 atau 89,08%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 458.502.475,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 95.940.116,00 atau 20,92% dari tahun lalu.hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

• ***Program Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)***

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 453.200.000,00 pada Program Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, UPUI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 424.198.678,00 atau 93,60%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 436.606.066,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 12.407.388,00 atau 2,84% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 124.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.103.742,00 atau 88,65%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 107.865.844,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp. 2.237.898,00 atau 2,07% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis industri Provinsi Melalui SIINas***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.711.474,00 atau 89,20%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 90.384.064,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 8.672.590,00 atau 9,60% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 237.400.00000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 232.383.462,00 atau 97,89%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 238.356.158,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 5.972.696,00 atau 2,51% dari tahun lalu.hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

#### **UPTD BPSMB**

• **Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 79.320.000,00 pada Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 79.320.000,00 atau 100%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 2.995.188.947,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.915.868.947,00 atau 97,35% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 79.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.320.000,00 atau 99,96%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 433.254.464,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 353.934.464,00 atau 81,69% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

• **Program Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 159.000.000,00 pada Program Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 154.311.120,00 atau 97,05%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 101.256.427,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 53.054.693,00 atau 52,40% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 159.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 154.311.120,00 atau 97,05%. Ila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 101.256.427,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 53.054.693,00 atau 52,40% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
  
- **Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 683.619.347,00 pada Program Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 656.344.741,00 atau 96,01%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 146.617.030,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 509.727.711,00 atau 347,66% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegiatan Penyediaan Kompenen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.986.507,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.986.507,00 atau 100%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 9.984.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.002.507,00 atau 20,06% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegitan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 156.504.440,00 dan terealisasi sebesar Rp. 145.217.580,00 atau 92,79%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 48.280.420,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 96.937.160,00 atau 200,78% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.46.581.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.871.100,00 atau 92,04%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 46.521.750,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 3.650.650,00 atau 7,85% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.939.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.920.000,00 atau 99,01%. Bila dibandingkan dengan

tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.920.000,00 maka Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan sama di TA 2024.

- ***Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.660.000,00 atau 39,90%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 447.408.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 446.689.554,00 atau 99,84%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.729.862,00 pada Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.275.000,00 atau 73,71%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 120.199.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 118.924.000,00 atau 98,94% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.729.862,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.275.000,00 atau 73,71%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp.750.315.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 749.040.000,00 atau 99,83% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

• **Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.107.408.640,00 pada Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.015.046.029,00 atau 95,62%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.837.177.743,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 177.868.286,00 atau 9,68% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.039.000,00 atau 90,39%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 8.336.000,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp. 703.000,00 atau 8,43% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 174.018.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 156.341.909,00 atau 89,84%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 156.582.913,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 241.004,00 atau 0,15% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.923.390.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.849.665.120,00 atau 96,17%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.672.258.830,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 177.406.290,00 atau 10,61% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

• **Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 193.982.550,00 pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 122.629.497,00 atau 63,22%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 356.684.283,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 234.054.786,00 atau 65,62% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 38.072.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.099.272,00 atau 71,18%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 73.685.718,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 46.586.446,00 atau 63,22% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 88.802.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.870.225,00 atau 49,40%. Bila dibandingkan dengan

tahun lalu realisasi sebesar Rp. 147.642.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 103.772.275,00 atau 70,29% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 67.080.00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.660.000,00 atau 76,98%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 135.356.065,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 83.696.065,00 atau 61,83% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

• **Program Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.692.091.006,00 pada Program Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.628.683.424,00 atau 96,25%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 4.805.194.774,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 3.176.511.350,00 atau 66,11% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pemantauan Mutu Produk***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.644.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.602.050,00 atau 92,32%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 597.057.485,00 dan terealisasi sebesar Rp. 557.505.809,00 atau 93,38%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 2.377.315.100,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.819.809.291,00 atau 76,55% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 343.455.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 335.019.211,00 atau 97,54%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 317.629.780,00 maka terjadi kenaikan sebesar

Rp. 17.389.431,00 atau 5,47% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 672.933.721,00 dan terealisasi sebesar Rp. 663.556.354,00 atau 98,61%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.821.219.490,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.157.663.136,00 atau 63,57% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.

## **UPTD PELATIHAN KOPERASI**

- **Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 90.000.000,00 pada Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 87.960.000,00 atau 97,73%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 249.900.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 161.940.500,00 atau 64,80% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 87.960.000,00 atau 97,73%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp.1.364.528.205,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 161.940.500,00 atau 64,80% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggaran di TA 2024.

- **Program Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 80.801.025,00 pada Program Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 44.816.900,00 atau 55,47%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena program baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.087.625,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.450.000,00 atau 93,68%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.584.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.336.000,00 atau 42,57%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.923.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.200.000,00 atau 11,04%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.280.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.580.000,00 atau 67,20%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.926.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.250.900,00 atau 86,57%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
  
- **Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 118.800.000,00 pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 117.403.000,00 atau 98,82%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena program baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 118.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 117.403.000,00 atau 98,82%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
  
- **Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 417.382.576,00 pada Program Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 409.589.864,00 atau 98,13%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.505.771.227,00 maka terjadi penambahan sebesar Rp. 1.096.181.363,00 atau 72,80% dari tahun lalu. hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.592.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.489.500,00 atau 99,58%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 20.994.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.495.500,00 atau 16,65% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
- ***Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.279.040,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.178.500,00 atau 99,30%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.379.959.830,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.365.781.330,00 atau 98,97% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
- ***Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.938.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.724.746,00 atau 99,47%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 102.957.397,00 maka terjadi penurunan n sebesar Rp. 63.232.651,00 atau 61,42% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
- ***Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.939.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.395.000,00 atau 71,94%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.860.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 465.000,00 atau 25% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di TA 2024.
- ***Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.957.870,00 dan terealisasi sebesar Rp. 75.114.000,00 atau 98,89%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.473.891,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.950.000,00 atau 98,22%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Penyediaan Bahan/Material***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.801.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85.460.000,00 atau 99,60%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 145.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 140.278.118,00 atau 96,48%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

• **Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 393.662.643,00 pada Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 389.450.000,00 atau 98,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 270.950.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 118.500.000,00 atau 43,74% dari tahun lalu.

- ***Kegiatan Pengadaan Mebel***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.886.298,00 dan terealisasi sebesar Rp. 146.700.000,00 atau 98,53%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- ***Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 244.776.345,00 dan terealisasi sebesar Rp. 242.750.000,00 atau 99,17%. bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 270.950.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 118.500.000,00 atau 43,74% dari tahun lalu.

• **Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.303.818.282,00 pada Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.215.870.674,00 atau 96,18%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 180.624.793,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.035.245.881,00 atau 126,78% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.904.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.052.000,00 atau 85,56%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.052.000,00 atau 26,30% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 219.990.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 154.662.869,00 atau 70,30%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 176.624.793,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 21.961.924,00 atau 12,43% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya realisasi yg belum maksimal di TA 2024.
- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 43.562.886,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.521.000,00 atau 99,90%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.034.359.996,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.012.634.805,00 atau 98,93%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.
- **Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 322.421.300,00 pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 317.999.672,00 atau 98,63%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.417.822.703,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.099.823.031,00 atau 77,57% dari tahun lalu.
  - ***Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 32.996.000,00. dan terealisasi sebesar Rp. 32.722.372,00 atau 99,17%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 58.900.935,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 26.178.563,00 atau 44,45% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 57.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.678.300,00 atau 99,58%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp 855.073.768,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 797.395.468,00 atau 93,25% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.
  - ***Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 231.505.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 227.599.000,00 atau 98,31%. Tidak ada perbandingan dengan tahun lalu karena sukegiatan baru ada di TA 2024.

- **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah provinsi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 4.997.364.160,00 pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 4.709.206.591,00 atau 94,23%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.514.875.192,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.194.331.399,00 atau 210,86% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

- ***Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.997.364.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.709.206.591,00 atau 94,23%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp. 1.514.875.192,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.194.331.399,00 atau 210,86% dari tahun lalu.hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran di TA 2024.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis PNS karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Kurang tepat waktu dalam pelaksanaan pengSPJan kegiatan di setiap bidang.
- Beberapa kegiatan yang di laksanakan tidak sesuai dengan angkas yang di tetapkan di setiap bulan.
- Besaran pagu GU yang terbatas (sangat kecil) sehingga perputaran UP tidak fleksibel.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUTANSI

#### 4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

#### 4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

##### **4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi**

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)  
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi FMIS Keuangan  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

#### 4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

##### 4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- **Definisi**

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- **Pengukuran**

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

##### 4.4.2.2 Belanja

- **Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk

perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

#### 4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

#### 4.4.2.4 Beban

- **Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/

jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain

#### 4.4.2.5 Aset

- **Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset nonlancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
  - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
  - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu:Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

**ASET**

**ASET LANCAR**

**Kas dan Setara Kas**

Kas di Kas Daerah  
Kas di Bendahara Penerimaan  
Kas di Bendahara Pengeluaran  
Kas di BLUD  
Kas di Bendahara FKTP  
Kas di Bendahara BOS  
Kas Lainnya  
Setara Kas

**Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek Lainnya

**Piutang Pendapatan**

Piutang Pajak Daerah  
Piutang Retribusi  
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan  
Piutang Lain-lain PAD yang Sah  
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan  
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya  
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya  
Piutang Pendapatan Lainnya

**Piutang Lainnya**

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang  
Uang Muka  
Panjar Kegiatan  
Piutang Kelebihan Pungut Pph

**Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang Pendapatan  
Penyisihan Piutang Lainnya

**Beban Dibayar Dimuka**

Beban Pegawai Dibayar Dimuka  
Beban Barang Dibayar Dimuka  
Beban Jasa Dibayar Dimuka  
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka  
Beban Lainnya Dibayar Dimuka

**Persediaan**

Persediaan Bahan Pakai Habis  
Persediaan Bahan/Material  
Persediaan Barang Lainnya

**INVESTASI JANGKA PANJANG**

**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya  
Investasi dalam Obligasi  
Investasi dalam Proyek Pembangunan  
Dana Bergulir  
Deposito Jangka Panjang  
Investasi Non Permanen Lainnya

**Investasi Jangka Panjang Permanen**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

**ASET TETAP**

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

**ASET LAINNYA**

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

**4.4.2.6 Kewajiban**

- **Definisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ **KEWAJIBAN**

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri

- Utang Jangka Panjang Lainnya

#### 4.4.2.7 Ekuitas

- **Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**
- EKUITAS
- Surplus/Defisit-LO
- Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD**

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 yang kemudian disempurnakan kembali dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2024.

**5.1.1. Pendapatan**

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.891.400.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.137.753.600 atau sebesar 127,64%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 telah menargetkan obyek pendapatan, yaitu pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN - LRA	891.400.000,00	1.137.753.600,00	127,64	1.128.267.400,00	0,84
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u> <u>- LRA</u>	891.400.000,00	1.137.753.600,00	127,64	1.128.267.400,00	0,84
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	891.400.000,00	1.137.753.600,00	127,64	1.128.267.400,00	0,84

Tabel 2. Rincian Objek Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

Pendapatan secara total melampaui/tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendapatan sudah melampaui target. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**5.1.1.1. Retribusi**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dari target sebesar Rp. 891.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.137.753.600,00 atau 127,64%, bila dibandingkan dengan tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 9.486.200,00 atau 0,84%. Penyebab tercapai/tidak tercapainya target serta kenaikan/penurunan antara tahun 2024 dan tahun 2023 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adapun rincian anggaran dan realisasi ketiga kategori pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<b>Retribusi</b>	891.400.000,00	1.137.753.600,00	127,64	1.128.267.400,00	0,84
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	891.400.000,00	1.137.753.600,00	127,64	1.128.267.400,00	0,84
- Retribusi Tempat Penginapan	29.400.000,00	34.600.000,00	117,69	26.400.000,00	95,5
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	862.000.000,00	1.103.153.600,00	127,98	0,00	100

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

**5.1.1.1.1. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari sembilan obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

- Retribusi Tempat Penginapan

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Tempat Penginapan. Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan dari target sebesar Rp. 29.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.600.000,00 atau 117,69%. Bila Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.16.900.000,00 atau sebesar 95,5%, hal ini disebabkan antara lain :
  - Terdapat kenaikan dalam pemakaian tempat penginapan dikarenakan adanya sarana promosi ke masyarakat umum.
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
  - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menarik Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dari target sebesar Rp. 862.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.103.153.600,00 atau 127,98%. bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp.0,00 maka persediaan tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 152.666.467.816,00 terealisasi sebesar Rp. 136.963.108.149,00 atau sebesar 90,96%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<b>Belanja</b>	<b>152.666.467.816,00</b>	<b>136.963.108.149,70</b>	<b>89,71</b>	<b>91.387.079.849,00</b>	<b>49,87</b>
<i>Belanja Operasi</i>	80.390.694.060,00	74.791.924.265,70	93,04	56.125.676.301,00	33,26
Belanja Pegawai	23.649.363.010,00	21.095.881.539,00	89,20	14.563.650.275,00	44,85
Belanja Barang dan Jasa	56.741.331.050,00	53.696.042.726,70	94,63	41.562.026.026,00	29,19
<i>Belanja Modal</i>	72.275.773.756,00	62.171.183.884,00	86,02	35.261.403.548,00	76,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.503.401.125,00	4.377.372.060,00	97,20	7.968.029.420,00	(45,06)
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	27.486.857.631,00	25.696.829.370,00	93,49	27.293.374.128,00	(5,85)
Belanja Aset Lainnya	3.581.515.000,00	3.461.011.584,00	96,64	0,00	0

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai/tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja dari target sebesar Rp. 80.390.694.060,00 terealisasi sebesar Rp. 74.791.924.265,00 atau 93,04%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<i>Belanja Operasi</i>	80.390.694.060,00	74.791.924.265,70	93,04	56.125.676.301,00	33,26
Belanja Pegawai	23.649.363.010,00	21.095.881.539,00	89,20	14.563.650.275,00	44,85
Belanja Barang dan Jasa	56.741.331.050,00	53.696.042.726,70	94,63	41.562.026.026,00	29,19

Tabel 5. Rincian Objek Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

▪ Belanja Pegawai

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 23.649.363.010,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau nonPNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp. 21.095.881.539,00 atau sebesar 89,20%.

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<b><u>Belanja Pegawai</u></b>	23.649.363.010,00	21.095.881.539,00	89,20	14.563.650.275,00	44,85
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.297.201.926,00	7.214.396.539,00	86,95	5.171.633.025,00	39,50
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	14.566.611.084	13.125.365.000	90,11	8.314.227.500,00	35,72
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	785.550.000,00	756.120.000,00	96,25	706.270.000,00	7,06

Tabel 6. Rincian Objek Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Tersisnya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 2.553.481.471,00 atau sebesar

12,10% disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kalimantan Timur berdasarkan kebutuhan jumlah pegawai januari tahun 2024 dan belum memasukkan perhitungan pegawai yang akan pensiun di tahun 2024 serta adanya beberapa jabatan struktural yang masih belum terisi.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp. 56.741.331.050,00 dan realisasi sebesar Rp. 53.696.042.726,00 atau sebesar 94.63 %.

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.741.331.050,00	53.696.042.726,70	94,63	41.562.026.026,00	29,19
Belanja Barang Pakai Habis	17.373.031.288,00	16.553.918.907,00	95,29	6.913.484.309,00	139,44
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
Belanja Jasa Kantor	17.381.050.540,00	15.843.282.821,00	91,15	13.492.562.105,00	17,42
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	856.571.076,00	560.934.080,00	65,49	586.455.480,00	(4,35)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.582.633.000,00	1.564.495.367,00	98,85	343.803.700,00	355,05
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.393.875.000,00	1.389.719.224,00	99,70	1.971.963.295,00	(29,53)
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	256.299.000,00	0
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	390.865.900,00	390.655.800,00	99,95	386.222.713,00	1,15
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	370.500.000,00	313.178.316,00	84,53	375.667.000,00	(16,63)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	62.127.800,00	51.588.401,70	83,04	3.323.800,00	1452,09
Belanja Pemeliharaan Tanah	1.705.064.166,00	1.624.749.844,00	95,29	1.943.034.076,00	(16,38)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	648.704.366,00	587.751.110,00	90,60	575.392.911,00	2,15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	941.363.800,00	922.518.734,00	98,00	1.367.641.165,00	(32,55)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.716.000,00	61.200.000,00	99,16	0,00	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	13.994.823.280,00	13.780.227.187,00	98,47	13.702.141.930,00	0,57
Belanja Perjalanan Luar Negeri	166.089.000,00	166.088.739,00	100,00	1.577.068.618,00	(89,47)

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	0,00	0

Tabel 7. Rincian Objek Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.045.288.324,00 atau sebesar 5,67% disebabkan karena adanya selisih harga negosiasi dengan harga e-katalog sehingga realisasi anggaran lebih kecil dari pagu anggaran yang disediakan.

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 72.275.773.756,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp. 62.171.183.884,00 atau sebesar 86,02%.

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<b>Belanja Modal</b>	<b>72.275.773.756,00</b>	<b>62.171.183.884,00</b>	<b>86,02</b>	<b>35.261.403.548,00</b>	<b>76,32</b>
Belanja Modal Tanah	36.704.000.000,00	28.635.970.870,00	78,02	0,00	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.503.401.125,00	4.377.372.060,00	97,20	7.968.029.420,00	(45,06)
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	27.486.857.631,00	25.696.829.370,00	93,49	27.293.374.128,00	(5,85)
Belanja Modal Aset Lainnya	3.581.515.000,00	3.461.011.584,00	96,64	0,00	100

Tabel 8. Rincian Objek Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Belanja modal sebesar Rp. 62.171.183.884,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Belanja Modal Tanah
- Belanja modal alat angkutan
- Belanja modal alat kantor
- Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
- Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
- Belanja modal alat laboratorium
- Belanja modal komputer
- Belanja Moda Bangunan dan Gedung

- Belanja Modal Aset Lainnya

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp. 10.104.589.872,00 atau sebesar 16,25% disebabkan karena sisa pengadaan barang/jasa paket belanja modal.

### 5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 1.137.753.600,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2023 sebesar Rp. 1.128.267.400,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 9.486.200,00 atau sebesar 0,84%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
<b>PENDAPATAN – LO</b>	<b>1.137.753.600,00</b>	<b>1.128.267.400,00</b>	<b>0,84</b>
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</u>	1.137.753.600,00	1.128.267.400,00	0,84
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.137.753.600,00	1.128.267.400,00	0,84

Tabel 9. Rincian Objek Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023

#### 5.1.3.1 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp. 1.137.753.600,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 1.128.267.400,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 9.486.200,00 Atau 0,84%. Rincian pendapatan retribusi daerah - LO tahun 2024 dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	1.110.567.400,00	(100,00)
- Retribusi Tempat Penginapan-LO	34.600.000,00	17.700.000,00	95,48
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	1.103.153.600,00	0,00	100

Tabel 10. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Bila Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.110.567.400,00 atau sebesar 100%, hal ini disebabkan antara lain:

- Banyaknya minat perusahaan dalam pemakaian alat laboratorium untuk melakukan pengujian sertifikasi dan kalibrasi.

- **Retribusi Tempat Penginapan-LO**  
 Bila Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan-LO tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 16.900.000,00 atau sebesar 95,48%, hal ini disebabkan antara lain:
  - banyaknya minat pengunjung atau masyarakat untuk menginap di gedung tempat penginapan UPTD Pelatihan Koperasi karena adanya media promosi yang di gunakan.
- **Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO**
  - Bila Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka tidak terjadi kenaikan/penurunan dikarenakan di tahun 2023 tidak ada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO.

5.1.4 **Beban LO**

peningkatan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2024 sebesar Rp. 74.856.913.676,67 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 70.909.392.306,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.947.521.370,67 Atau 5,57%. Rincian Beban LO tahun 2024 komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	74.856.913.676,67	70.909.392.306,00	5,57
- Beban Pegawai	21.095.881.539,00	14.563.650.275,00	44,85
- Beban Barang dan Jasa	53.556.110.090,70	52.064.818.974,00	2,86

Tabel 11. Rincian Objek Beban LO Tahun 2024 dan 2023

5.1.4.1 **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 21.095.881.539,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 14.563.650.275,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.532.231.264,00 atau sebesar 44,85%, hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya penambahan iuran BPJS kesehatan

5.1.4.2 **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Barang dan Jasa tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi

kenaikan sebesar Rp. 1.491.291.116,70 atau sebesar 2,86%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan penggunaan pada beban barang dan jasa pada tahun 2024.

5.1.4.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Beban penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka tidak ada perubahan nilai karena masih proses perhitungan Akumulasi Penyusutan di Aplikasi SIP BMD.

5.1.5. Aset

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp. 189.327.726.252,34 pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp.211.293.320.341,31 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 21.965.594.088,97 atau 10,40%. Rincian pendapatan aset tahun 2024 beserta komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	<b>189.327.726.252,31</b>	<b>211.293.320.341,31</b>	30,24
Aset Lancar	113.890.819,00	0,00	100
- Piutang Retribusi Daerah	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00
- Penyisihan Piutang	(41.350.000,00)	(41.350.000,00)	0,00
- Persediaan	121.230.819,00	0,00	100

Tabel 12. Rincian Aset TA 2024 dan 2023

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp. 113.890.819,00 Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu maka tidak ada perbandingan dengan tahun lalu. nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke

masyarakat Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 121.230.819,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp.0,00 maka persediaan tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan persediaan di tahun 2023 harus di jadikan nol karena adanya aplikasi baru untuk tahun 2024 .

5.1.5.1.2. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib di bayarkan kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah daerah yang tercantum besarnya dalam surat tagihan retribusi daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.41.350.000,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun lalu yaitu masih sama dengan tahun ini. Hal ini dikarenakan tidak ada tindak lanjut dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelesaikan masalah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset nonlancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp. 185.385.613.029,98 bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp.210.728.527.474,98 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.25.342.914.445,00 Atau 12,03%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset Tetap	<b>185.385.613.029,98</b>	<b>210.728.527.474,98</b>	-12,03
Tanah	59.672.064.870,00	31.038.594.000,00	92,25
Peralatan dan Mesin	61.599.517.190,64	57.732.847.880,64	6,70
Gedung dan Bangunan	66.507.660.981,00	149.847.661.726,00	-55,62
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.367.087.250,00	1.167.984.250,00	17,05
Konstruksi Dalam Pengerjaan	64.001.664.640,34	38.703.821.520,34	65,36
Aset Tetap Lainnya	281,439,795,00	281,439,795,00	100

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Akumulasi Penyusutan	(68.043.821.697,00)	(68.043.821.697,00)	0,00

Tabel 13. Rincian Objek Aset Tetap Tahun 2024

#### 5.1.5.2.1.1. Tanah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp. 59.672.064.870,00. Bila dibandingkan dengan aset tetap tanah pada tahun lalu yaitu sebesar Rp.31.038.594.000,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan pada tahun 2024. Perubahan nilai Tanah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

##### Penambahan

- Belanja Modal : Rp.28.635.970.870,00
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin : Rp. 2.500.000,00

#### 5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp. 61.599.517.190,64. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp. 57.732.847.880,64, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.866.669.310,00 atau 6,70%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

##### Penambahan

- Belanja Modal : Rp.3.401.858.500,00
- Reklasifikasi dari Tanah : Rp. 2.500.000,00

##### Pengurangan

- Hibah : Rp. ....
- Dihapuskan : Rp. 335.830.000,00
- Reklasifikasi : Rp. ....
- Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp. ....

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

#### 5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp. 66.507.660.981,00 bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 149.847.661.726,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 83.340.000.745,00 Atau 55,62%. Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

##### Penambahan

- Belanja Modal : Rp. 25.696.829.370,00

##### Pengurangan

- Hibah : Rp. 33.510.767.995,00  
- Reklasifikasi : Rp. 25.297.843.120,00  
- Reklasifikasi dari Jalan Jaringan:Rp. 199.103.000,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

#### 5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.367.087.250,00 bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 1.167.984.250,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 199.103.000,00 Atau 17,05%

#### 5.1.5.2.1.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 64.001.664.640,34 bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sama tidak ada kenaikan/penurunan.

terdiri dari:

- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan menjadi KDP (Gedung Galery)
- Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan menjadi KDP (Pengaspalan Halaman Kantor)

#### 5.1.5.2.1.6. Aset Tetap Lainnya

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.

281.439.795.00 bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sama tidak ada kenaikan/penurunan.

#### 5.1.5.2.1.7 Akumulasi Penyusutan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2024 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.63.700.032.070,00 bila dibandingkan dengan Akumulasi penyusutan tahun lalu maka tidak ada perubahan nilai karena masih proses perhitungan Akumulasi Penyusutan di Aplikasi SIP BMD.

#### 5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp. 3.820.882.403,36 Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 564.792.866,33,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp3.256.089.537,03 Atau 576,51%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

#### 5.1.5.2.2.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 4.867.009.284,00 bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp. 1.405.997.700,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.461.011.584,00 atau 246,16% hal ini dikarenakan adanya penambahan aset tidak berwujud karena dampak permendagri 108 dan adanya jurnal penyesuaian dari hasil rekon BMD.

5.1.5.2.2.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat
- Aset Yang Akan di Lelang

Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Lain - Lain sebesar Rp. 1.142.689.300,00 bila dibandingkan dengan Aset Lain Lain tahun lalu maka dapat diketahui tidak terdapat penambahan atau pengurangan pada Aset Lain - Lain pada tahun 2024.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Pada akhir tahun 2024 terdapat kewajiban sebesar Rp. 55.954.066,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 74.655.883,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.18.701.817,00 atau 25,05%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1.Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 55.954.066,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp. 74.655.883,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 18.701.817,00 atau 25,05%.

5.1.6.2. Utang Belanja

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2024 terdapat Utang beban sebesar Rp. 55.954.066,00 Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 74.655.883,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 18.701.817,00 atau 25,05%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan jumlah pemakaian di tahun 2024 antara lain dari tagihan listrik, air, dan telepon.

No	Uraian	Tahun		% Naik/ Turun
		2024	2023	
1	Listrik	47.697.106,00	61.376.110,00	(22,29)
2	Air	2.472.386,00	3.030.556,00	(18,42)
3	Telepon	5.784.574,00	8.179.617,00	(29,28)

Tabel 14. Rincian Objek Utang Beban Tahun 2024 dan 2023

#### 5.1.7 Ekuitas

Kekayaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 189.264.432.186,34 Nilai ini secara matematikatis merupakan selih lebih dari aset atas kewajiban Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp. 211.218.664.458,31 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 21.954.232.271,97 atau 10,39%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya beberapa penambahan aset pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2024.

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl MT. Haryono No. 45 Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD/B tersebut beralamat sebagai berikut:

➤ **UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

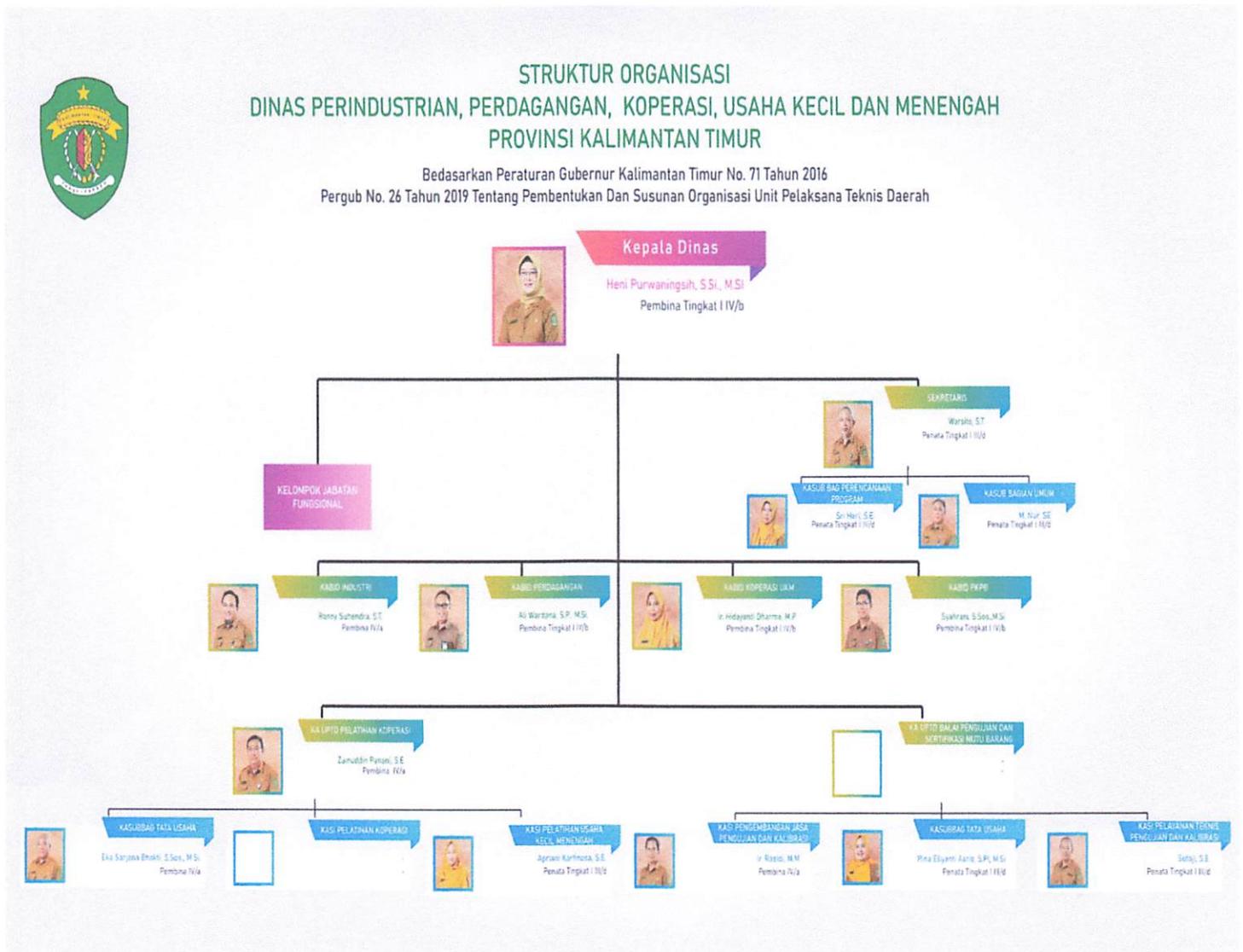
UPTD dengan wilayah/ cakupan kerja meliputi kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang beralamat di Jl MT. Haryono No. 45 Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih Kota Samarinda.

➤ **UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM**

UPTD dengan wilayah/ cakupan kerja meliputi kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi beralamat di Jl DI Panjaitan No. 25 Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

**Struktur Organisasi Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur**



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

**6.2. Tugas dan Fungsi**

Tugas Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD/B dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur**

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.**

Tugas yang mejadi tanggungjawab UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknsi operasional pelaksanan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan,
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **UPTD Pelatihan Koperasi.**

Tugas yang mejadi tanggungjawan UPTD Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan Koperasi.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.* Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program

pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

### 6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Dinas		1				
Kepala Bidang		2	4			
Kepala Sub Bidang		4	16			1
Staf		2	9		10	16
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>29</b>		<b>10</b>	<b>17</b>

Tabel 15. Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2024

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

## BAB VII PENUTUP

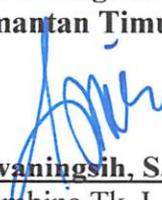
Laporan Keuangan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

**Samarinda, 31 Desember 2024**  
**Kepala Dinas Perindustrian,**  
**Perdagangan, Koperasi, dan Usaha**  
**Kecil dan Menengah Provinsi**  
**Kalimantan Timur,**

  
**Heni Purwaningsih, S.Si, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730314 199803 2 009

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2024
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2024 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2024
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2024 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2024
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2024 yang ditagih / dibayar tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2024 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2024 dengan tanggal cetak diatas 31 desember 2024 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2024 ( yang telah diotorisasi )
Lampiran XVII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)

Lampiran XVIII	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2024 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2024 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2024 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXIV	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2024
Lampiran XXVI	Rekapitulasi sewa dibayar dimuka/Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXVII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXVIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2024 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)



DINAS  
PEPERUSAHAAN  
PROV. KALTIMA

Jl. MT. Haryono No. 45 Samarinda 75124  
Telepon : (0541) 7807277

Home Page :